

UJI KOMPETENSI 3

**UPAYA PENCEGAHAN SERTA
PENANGANAN TERJADINYA
PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN**

Kelas XII

NAMA :

KELAS :

NO ABSEN :

A. Pilihlah Jawaban Yang Benar!

1. Bacalah berita berikut !

Satlantas Polres Rembang kini mulai *memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mobile atau tilang elektronik menggunakan Handphone (HP). Terkini, telah ada 25 anggota yang mengantongi aplikasi tersebut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

Sumber: <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/15/06/2022/catat-polisi-di-rembang-kini-bisa-tilang-pelanggar-lewat-hp-begini-caranya/>, diunduh 23 Agustus 2022

Jika dikaitkan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, berdasarkan berita di atas disimpulkan bahwa.....

- a. System tilang elektronik sangat efektif mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
- b. Satlantas Polres Rembang telah menerapkan asas akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan public
- c. Masyarakat harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban Ketika dalam pantauan
- d. Tegaknya supremasi hukum ditentukan oleh seberapa banyak ETLE yang dipasang
- e. Satlantas Polres Rembang telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta masyarakat harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam berlalu lintas

2. Bentuk kepedulian warga agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan negara adalah.....

- a. Mengikuti kegiatan musyawarah di balai desa
- b. Tidak bertamu pada saat jam belajar masyarakat
- c. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu
- d. Tidak membuat keributan saat tetangga beribadah
- e. Menolak memberikan jawaban kepada teman saat ujian

3. Perhatikan gambar berikut!



Sumber: <https://gorontalo.bawaslu.go.id/professor-rauf-hatu-jelaskan-tantangan-pemilu-serentak-2024/>, diunduh 23 Agustus 2022

Fakta seperti gambar di atas merupakan upaya pencegahan terjadinya.....

- a. Pelanggaran hak warga negara atas kesejahteraan social
- b. Pelanggaran hak warga negara dalam memberikan hak pilih

- c. Pelanggaran hak warga negara terhadap negara atas pelayanan public
- d. Peningkatan kewajiban oleh komisi pemilihan umum dalam mengoptimalkan peran Lembaga penegak hukum
- e. Peningkatan kewajiban oleh komisi pemilihan umum dalam meningkatkan pembangunan nasional

4. Bacalah berita berikut!

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 mengungkapkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34,89 persen, sedangkan non-disabilitas 81,61 persen. Adapun, akses internet penyandang disabilitas 8,50 persen sedangkan non disabilitas 45,46 persen.

"Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus mengatasi hal ini karena pemenuhan informasi adalah hak setiap warga negara," tegasnya.

Senada dengan Harry, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyampaikan bahwa teknologi digital dinilai akan memainkan peran penting bagi peningkatan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas.

Sumber: <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas/>, diunduh 23

Agustus 2022

Berdasarkan berita diatas, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga.....

- a. Teknologi dapat meningkatkan integrasi bangsa
- b. Masyarakat memiliki kesamaan hak tanpa diskriminasi
- c. Masyarakat memiliki kemudahan mengakses informasi

- d. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara akan meningkat
 - e. Kewajiban negara dalam peraturan perundang undangan telah terlaksana
5. Pemerintah memberikan hak yang sama bagi laki – laki dan perempuan dalam proses pembuatan surat ijin mengemudi (SIM). Cara tersebut menunjukkan adanya upaya.....
- a. Diskriminasi terhadap masyarakat
 - b. Mendapat simpati masyarakat
 - c. Nondiskriminasi dalam pelayanan public
 - d. Meningkatkan peran perempuan di segala bidang
 - e. Pencitraan pemerintah di mata masyarakat
6. Saat melakukan Razia kendaraan, polisi tidak menemukan adanya pelanggaran. Seluruh pengendara telah mengenakan alat berkendara serta membawa surat – surat berkendara secara lengkap. Kondisi tersebut membuktikan bahwa.....
- a. Pemerintah berhasil mendapat simpati masyarakat
 - b. Masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi
 - c. Pemerintah telah memberikan pelayanan public dengan baik
 - d. Pemerintah berhasil Menyusun peraturan perundang – undangan

- e. Supremasi hukum di Indonesia lebih baik daripada supremasi hukum di negara lain.
7. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dicegah melalui peningkatan pelayanan public. Salah satu asas dalam pelayanan public adalah akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas dalam pelayanan public adalah.....
- a. Membuat kebijakan yang bersifat efektif dan efisien
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa imbalan
 - c. Melayani pembuatan SIM tanpa membedakan suku, agama, maupun gender
 - d. Meluncurkan aplikasi yang dapat dijadikan sarana menampung aspirasi warga negara
 - e. Memberikan informasi pelayanan public melalui *website* yang dapat diakses seluruh warga negara.
8. Setiap peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan upacara secara tertib akan mendapatkan sanksi karena.....
- a. Sanksi berfungsi memberi efek jera
 - b. Upacara merupakan kegiatan sacral
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan upacara merupakan kewajiban

- d. Kemajuan Pendidikan bergantung pada kedisiplinan peserta didik
 - e. Kepatuhan peserta didik menjadi kunci keberhasilan proses pembelajaran
9. Bentuk peningkatan pelayanan public yang bersifat nondiskriminasi dicontohkan oleh pernyataan.....
- a. Burhan mengajak tio mengerjakan tugas kelompok
 - b. Fitri mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan umum
 - c. Galih selalu membawa SIM dan STNK saat berkendara
 - d. Tika mendapat upah setelah menyelesaikan pekerjaan
 - e. Pemerintah memasang *guiding block* di berbagai tempat
10. Siap aparat penegak hukum memiliki peran mencegah dan menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai undang – undang nomor 19 tahun 2019 memiliki peran menangani kasus.....
- a. Penipuan transaksi jual beli
 - b. Pelanggaran lalu lintas
 - c. Tindak pidana korupsi
 - d. Gerakan separatism

e. Sengketa tanah